
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026

**DINAS PERDAGANGAN DAN
TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



JALAN H. AGUS SALI
PAINAN
TELP. (0756) 21504
21032
PAINAN – 25611

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 merupakan dokumen yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program yang ada dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 ke dalam strategi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, sehingga renstra ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Penganggaran Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan untuk tahun 2021-2026.

Kepada Tim Penyusunan Revisi Renstra kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya sehingga Revisi Renstra ini dapat diselesaikan dan dapat berguna bagi kita semua terlebih bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Amin.

**Kepala Dinas
Perdagangan dan Transmigrasi
Kabupaten Pesisir Selatan**



MIMI RIARTY ZAINUL, SE.Ak, M.Si
NIP. 19790529 200212 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1,2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.	5
Bab. II Gambaran Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	8
2.1 Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	8
2.2 Sumber Daya Dinas Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	16
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan pada Dinas Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	23
Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	33
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan pada Dinas Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	33
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.	39
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sumatera Barat, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat.	41
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup strategis serta penentuan Isu isi stratgis	44
3.5 Penentuan Isu isu strategis	45
Bab IV Tujuan dan Sasaran	48

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	48
Bab V Stretegi dan Arah Kebijakan.	50
Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	54
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas	54
Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	58
Bab VIII Penutup	63
LAMPIRAN	
A. Cascading	
B. Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026	

DAFTAR TABEL

Tabel .2.2	Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	16
Tabel .2.3	Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2021	16
Tabel.2.4	Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Berdasarkan Golongan tahun 2021	
Tabel 2.5	Sarana Dan Prasarana Dinas Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021	17
Tabel 2.6a	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 s.d 2020	24
Tabel 2.6b	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 s.d 2020	26
Tabel 2.7a	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2020	27
Tabel 2.7b	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2020	29
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2026	49
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Sektor Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi tahun 2021-2026	51
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	60
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Peradgangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	15
------------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah/wilayah dalam waktu tertentu. Dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibawah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang secara teknis membidangi sektor utama Perekonomian yaitu sektor Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. Sektor ini mempunyai peranan yang sangat penting dan merupakan ujung tombak untuk menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan. Oleh karena itu, agar tahapan pembangunan perekonomian yang berbasis masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh serta berlangsung secara berkesinambungan perlu adanya perencanaan strategis. Perencanaan strategis yang dibuat merupakan proses yang berorientasi pada hasil (*outcome*) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada.

Seiring dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka perlu dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026 yang ditujukan untuk konsistensi pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 mengenai perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru yang dibentuk atas peleburan dan penggabungan 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian serta Dinas

Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Berkaitan dengan ini, maka perlu disusun dokumen Perencanaan Pembangunan di tingkat OPD, yaitu Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2026 sebagai langkah awal perencanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi selama lima tahun kedepan.

Isi pokok dari dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan ini juga mengacu pada:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Sumatera Barat
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Visi dan Misi dari Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan terpilih

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan gender didaerah
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;

21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 138 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. MAKSUD

Penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen rencana resmi yang berisikan Visi dan Misi Kepala Daerah serta Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dari Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan dengan mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi dari segenap lapisan masyarakat dan *stakeholder* sehingga lebih memantapkan dalam pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut maka di dalam Renstra juga disusun rencana kerja selama 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Program/Kegiatan, yang nantinya akan digunakan sebagai pedoman rencana kerja Tahun 2021-2026.

b. TUJUAN

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman bagi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan organisasinya, sehingga ketika pimpinan berubah organisasi tidak bertukar kebijakan.
2. Memberikan arah dan acuan bagi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan Rencana Kerja selama periode 2021-2026 sehingga Program/Kegiatan yang disusun dapat dilaksanakan secara kontiniu/berkelanjutan.
3. Memudahkan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dalam melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pencapaian dan kendala - kendala yang dihadapi dalam mencapai target dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan dokumen Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan.
- 1.4. Sistematika penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran.

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan .

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang dan Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 138 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan, maka Tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tersebut dijabarkan melalui tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas, Sekretariat dan bidang-bidang yang ada antara lain:

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

A. Tugas Pokok Kepala Dinas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah.

B. Fungsi Kepala Dinas

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengembangan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- c. Pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengembangan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- d. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- e. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) serta pembinaan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- f. Pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;

- g. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- i. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- k. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- l. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
- m. Menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- n. Membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi;
- o. Merumuskan kebijakan daerah dibidang pengembangan perdagangan, perindustrian dan transmigrasi;
- p. Melaksanakan bimbingan teknis dan survevisi atas pelaksanaan di bidang perdagangan dan perindustrian;
- q. Mengawasi, mengendalikan dan memantau pelaksanaan kegiatan dinas;
- r. Melaksanakan Administrasi Dinas
- s. Memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas;
- t. Menjalin kerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
- u. Mengkoordinir dan mengawasi Unit Pelaksana Teknis lingkup dinas;
- v. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretaris dibantu oleh 2 (dua)

Kepala Sub bagian yaitu :

- 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

A. Tugas Pokok Sekretaris

Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan urusan ketatausahaan keuangan, perencanaan program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan dilingkungan Dinas.

B. Fungsi Sekretaris

- a. Koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi ketatausahaan, organisasi, kepegawaian, tata laksana, tata persuratan, arsip, dokumentasi, perlengkapan rumah tangga, anggaran dan barang milik daerah kegiatan Dinas;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan urusan penganggaran, administrasi keuangan, perbendaharaan dan gaji Dinas;
- c. Koordinasi dan penyusunan rencana program serta evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perdagangan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Perdagangan dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :

1. Kepala Seksi Sarana dan Pelaku Distribusi
2. Kepala Seksi Pengendalian Barang Pokok dan Penting
3. Kepala Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri serta Pengembangan Perdagangan Luar Negeri

A. Tugas Pokok Kepala Bidang Perdagangan

Melakukan pengumpulan data, melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan dibidang sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan penting, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri dan pengembangan ekspor, fasilitasi ekspor impor serta bina pelaku ekspor impor.

B. Fungsi Kepala Bidang Perdagangan

- a. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- b. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- c. pemberian rekomendasi penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
- d. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah kabupaten/kota;

- e. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- f. memantau dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat daerah kabupaten/kota;
- g. koordinasi sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten/kota;
- h. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten/kota;
- i. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten/kota;
- j. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
- k. koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah di wilayah kerjanya;
- l. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya;
- m. pengawasan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
- n. koordinasi dengan komisi pengawas pupuk dan pestisida kabupaten/kota (KP3 Kabupaten/Kota), produsen, distributor, dan pengecer ditingkat daerah kabupaten/kota;
- o. penyelenggaraan dan partisipasi pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
- p. penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
- q. penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
- r. penerbitan Surat Keterangan Asal;
- s. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Perindustrian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Perindustrian dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :

1. Kepala Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri
2. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Industri
3. Kepala Seksi Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri

A. Tugas Pokok Kepala Bidang Perindustrian

Merumuskan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pembangunan dalam bidang Pengawasan, Pengendalian dan Pengelolaan Sistem Informasi Industri, Pengembangan Sumber Daya Industri, dan Pembangunan Sarana dan Prasarana serta Pemberdayaan Industri.

B. Fungsi Kepala Bidang Perindustrian

- a. Penyiapan, perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, dan pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran Izin Usaha Industri kecil, Izin Usaha Industri Menengah dan Izin Usaha Kawasan Industri yang izinnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- b. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan tenaga kerja industri dan penggunaan konsultan industri untuk industri unggulan kabupaten;
- c. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam Kabupaten;
- d. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi;
- e. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri;
- f. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Kabupaten;
- g. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang fasilitasi pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Kawasan Industri, dan Infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan oleh

Pemerintah Kabupaten;

- h. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pembinaan industri hijau untuk industri unggulan Kabupaten;
- i. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang standardisasi industri yang izinnnya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten;
- j. Penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem informasi industri di kabupaten; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Transmigrasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Bidang Transmigrasi dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yaitu :

- 1. Kepala Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- 2. Kepala Seksi Pembangunan Permukiman Transmigrasi dan Penataan Persebaran Penduduk
- 3. Pengembangan Masyarakat Transmigrasi

A. Tugas Pokok Kepala Bidang Transmigrasi

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis dan supervisi serta monitoring dan evaluasi dibidang pengembangan ekonomi, pengembangan sosial budaya dan evaluasi perkembangan permukiman dan kawasan transmigrasi.

B. Fungsi Kepala Bidang Transmigrasi

- a. Menumbuhkembangkan produksi pengolahan dan pemasaran serta kewirausahaan masyarakat transmigrasi;
- b. menyiapkan konsep pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual dan bantuan pangan kepada masyarakat transmigrasi;
- c. menyiapkan lembaga ekonomi dan permodalan, promosi dan publikasi dan kerja sama kemitraan;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- e. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan;

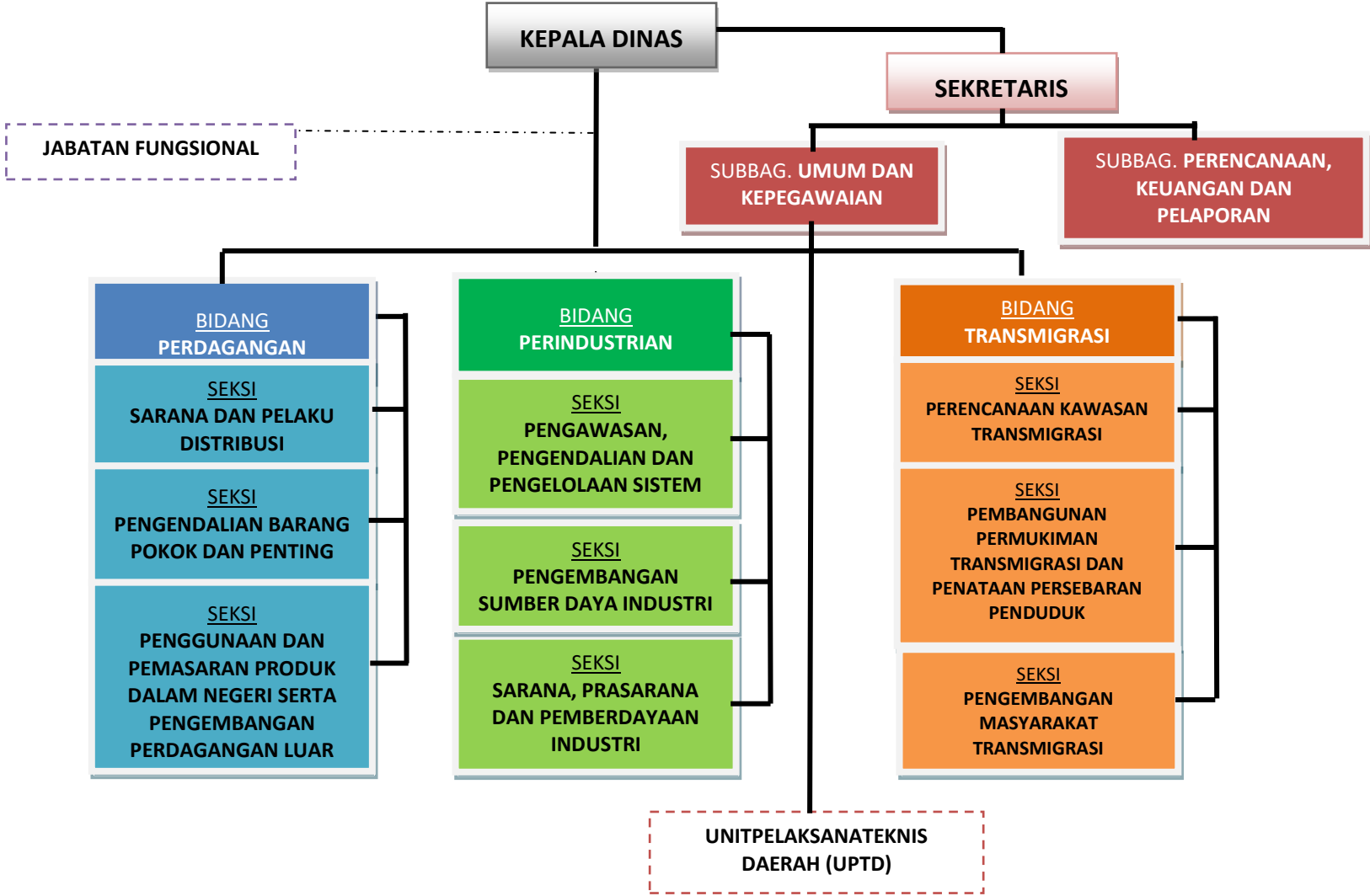
2.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kemetrolagian

Tugas dan Fungsi UPTD Kemetrolagian ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri, yaitu Peraturan Bupati Nomor 154 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kemetrolagian dan Standarisasi Pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi.

2.1.7 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada gambar 2.1

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN



2.2 Sumber Daya Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan didukung dengan sumber daya manusia yang cukup memadai, namun demikian dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan, mengingat tugas-tugas dimasa yang akan datang akan lebih berat, terutama dalam rangka menjalankan tugas pokok untuk membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dan tugas pembantuan Bidang Perdagangan dan Transmigrasi.

Kondisi Kepegawaian yang ada di lingkungan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan pada awal tahun 2021 sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang, dengan rincian dapat dilihat dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

PENDIDIKAN								
Uraian	S2	S1	D4	D3	SLTA	SLTP	SD	JUMLAH
ASN (Aparatur Sipil Negara)	9	26	0	2	1			38
NON ASN		10		4	16			30

Adapun Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki Jabatan Struktural adalah sebagaimana terdapat dalam tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Jabatan Struktural Tahun 2021

JABATAN			
Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jumlah
1	4	11	16

Sedangkan berdasarkan golongan Pegawai Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dapat diuraikan sebagaimana tabel 2.4.

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan
Berdasarkan Golongan Tahun 2021

Golongan IV	Golongan III	Golongan II	Golongan I	Jumlah
9	26	3	-	38

2.2.2 Sarana dan Prasarana Penunjang

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sarana dan prasarana penunjang yang termasuk aset pemerintah daerah yang dikelola Dinas Perdagangan dan Transmigrasi. Sarana dan Prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

No. Urut.	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang
1	2	3
1	TANAH	20
	TANAH	20
	TANAH UNTUK BANGUNAN GEDUNG	20
	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	15
	Tanah Bangunan Pasar	15
	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/ Jasa	5
	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5
2	PERALATAN DAN MESIN	339
	ALAT ALAT ANGKUTAN	14
	Alat Angkutan Darat Bermotor	14
	Kendaraan Bermotor Penumpang	2
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	2
	Kendaraan Bermotor Khusus	2
	Mobil Dapur Lapangan	2

Lanjutan Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

1	2	3
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	10
	Sepeda Motor	10
	Alat Angkutan Darat tak Bermotor	0
	Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	0
	Becak	0
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	6
	Alat Bengkel Bermesin	3
	Perkakas Bengkel Service	3
	Alat Bengkel (Workshop)	3
	Alat Bengkel Tak Bermesin	2
	Perkakas Bengkel Kerja	2
	Bor	2
	ALAT UKUR	1
	Alat Timbangan/Blora	1
	Timbangan Tera Ulang	1
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	313
	ALAT KANTOR	36
	Mesin Tik	2
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2
	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	0
	Mesin Ketik Manual Longewagen (18.)	0
	ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR	19
	Filling Besi/Metal	8
	Lemari Penyimpanan	7
	Peti Uang	1
	Lemari Kaca	3
	ALAT KANTOR LAINNYA	15
	Papan Nama Instansi	1
	Trolly Barang	2
	Mesin Absensi	1
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	4
	Meja Biro	2
	Generator Set	1
	Stabilizer	0
	Papan Informasi	4
	ALAT RUMAH TANGGA	180
	Meubilair	130
	Lemari Kayu	19
	Rak Kayu	17

Lanjutan Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

1	2	3
	Meja Kayu/Rotan	9
	Meja Rapat	10
	Meja Resepsion	3
	Kursi Tamu	3
	Kursi Putar	13
	Kursi Lipat	16
	Meja 1/2 Biro	8
	Sofa	2
	Kursi Kerja Staf	25
	Kulkas	3
	Kursi Tunggu	2
	Alat Pendingin	22
	AC Unit	16
	AC Split	3
	Kipas Angin	3
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	28
	Televisi	7
	Baliho	1
	Wireless	1
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	0
	Stabilisator	7
	Camera Video	1
	Tangga Alumunium	1
	Handy Cam	1
	Gorden	2
	Asbak	3
	Pompa Air (Alat Rumah Tangga)	1
	Lemari Es	1
	Rak Bambu	2
	KOMPUTER	47
	Komputer Unit/Jaringan	0
	Komputer	0
	Personal Komputer	14
	P.C. Unit	1
	Lap Top	12
	Note Book	1

Lanjutan Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

1	2	3
	Peralatan Mini Komputer	19
	Printer	2
	Computer Compatible	10
	Hard Disk Eksternal	7
	Peralatan Personal Komputer	13
	Printer	13
	Peralatan Jaringan	1
	Modem	1
	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	50
	Meja Kerja Pejabat	24
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	13
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	8
	Kursi Kerja Pejabat	26
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	8
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12
	ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI	3
	ALAT STUDIO	1
	Peralatan Studio Visual	1
	Proyektor + Attachment	1
	Camera Digital	0
	ALAT KOMUNIKASI	2
	Alat Komunikasi Telephone	2
	Faximile	2
	ALAT LABORATORIUM	3
	UNIT UNIT LABORATORIUM	2
	Alat Laboratorium Kimia Air	2
	Timbangan Elektronik	2

Lanjutan Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

1	2	3
	ALAT LABOR BENGKEL/MESIN	1
	Alat Labor Mesin	1
	Kotak/Kunci Set Besar	1
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	166
	BANGUNAN GEDUNG	166
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	146
	Bangunan Gedung Kantor	4
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4
	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	1
	Bangunan Tempat Ibadah Permanen	1
	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar	130
	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	109
	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Darurat	3
	Toilet/WC Umum Pasar	3
	Bangunan Los Pertokoan/Pasar	13
	Bangunan Pelataran Pertokoan/Pasar	2
	Bangunan Ged. Tempat Kerja Lainnya	11
	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	11
	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	1
	Rumah Dinas Golongan II	1
	Rumah Negara Golongan II Type C permanen	1
	BANGUNAN LAINNYA	19
	Bangunan MCK	2
	Bangunan Pos Jaga	1
	Halaman/Pelataran Parkir	2
	Bangunan Los Pasar	12
	Pelataran Pasar	2
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	16

Lanjutan Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

1	2	3
	JALAN DAN JEMBATAN	2
	JALAN	2
	Jalan Khusus	2
	JalanKhusus	1
	Jalan Khusus Komplek	1
	BANGUNAN AIR/ IRIGASI	12
	BANGUNAN AIR KOTOR	12
	BANGUNAN AIR KOTOR	12
	Saluran Pengumpul Air Kotor	12
	INSTALASI	2
	INSTALASI LAINNYA	2
	Instalasi Lampu	1
	Instalasi Jaringan Elektronik	1
5	ASET TETAP LAINNYA	75
	BUKU PERPUSTAKAAN	75
	BUKU	70
	Umum	25
	Buku Peraturan Perundang-undangan	25
	Ilmu Pengetahuan Praktis	45
	Ilmu Perdagangan Khusus Industri	5
	Lain-lain.	40
	TERBITAN BERKALA	5
	Terbitan Berkala	5
	Lain-lain	5
6	KOSTRUKSI DALAM Pengerjaan	15
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	15
	KONSTRUK	15
	KONSTRUKSI1	15

Lanjutan Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021

1	2	3
	KONSTRUKSI DALAM PEKERJAAN	15
7	ASET LAINNYA	0
	ASET LAIN-LAIN	0
	ASET TAK BERWUJUD	0
TOTAL		631

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Perdagangan dan Perindustrian Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan serta Urusan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan pada tabel 2.6a dan 2.6b. Kemudian untuk jumlah Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dilihat pada tabel 2.7a dan 2.7b

Tabel 2.6a

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 s.d 2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	URUSAN PERDAGANGAN																		
	Ekspor Bersih Perdagangan				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal				2,4	1,84	2,95	10	20	0,34	0,42	0,75	0	14,12	0,14	0,23	0,26	0,00	0,71
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB				12,2	12,41	12,59	12,77	12,95	12,24	12,54	12,75	12,29	12,25	1	1,01	1,01	0,96	0,95
	Persentase Pasar Rakyat Menuju Kriteria SNI (%)				0	10	18,18	27,27	36,36	0	10	18,18	27,27	36,36	0	1	1	1	1

2	URUSAN PERINDUSTRIAN																		
	Kontribusi Sektor Industri (%) PDRB Berdasarkan Harga Konstan tahun 2010				8,8	8,93	9,03	9,23	9,23	8,07	8,03	7,73	6,4	*6,47	0,92	0,90	0,86	0,69	0,70
	Pertumbuhan Industri Kecil (%)				1,9	2,02	2,21	2,39	2,59	2,84	6,08	10,12	8,94	1,2	1,49	3,01	4,58	3,74	0,46
	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (Industri Kecil) (%)				0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	11,76	27,45	27,45	12,5	1,56	5,88	13,73	13,73	6,25	0,78
	Persentase Tenaga Kerja Sektor Industri (%)				7,53	7,62	8,02	8,42	8,82	3,93	4,18	4,16	4,49	4,3	0,52	0,55	0,52	0,53	0,49
	Jumlah Sentra IKM (Unit)				0	0	0	1	1	1	3	3	3	3	1	1	1	3	3
	Produk yang berkualitas/ bersertifikat (Jenis produk)				6	8	10	12	15	16	2	19	32	35	2,67	0,25	1,9	2,66	2,33

Tabel 2.6b
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Transmigrasi dan tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 s.d 2020

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra OPD Tahun Ke-					Realisasi Capainan Tahun Ke-					Rasio Capain Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
3	URUSAN TRANSMIGRASI																		
	Pengembangan Wilayah Transmigrasi																		
	- persentase fasilitas dukungan KTM				15,27	13,42	13,42	13,42	13,42	11,17	13,45	14,32	11,02	12,92	0,73	1,00	1,07	0,82	0,96
	- Dukungan dan fasilitas badan pengelola KTM				30	40	50	70	70	1,1	6,67	2,52	0	0,27	0,37	0,17	0,05	0,001	0,0039

Tabel 2.7a

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 s.d 2020

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Anggaran
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
PENDAPATAN DAERAH	460.016. 000	477.504. 000	512.580.0 00	1.248.660.0 00	1.121.618.4 00	440.501. 000	416.057.0 00	424.748.0 00	454.506.0 00	418.688.0 00	96%	87%	83%	36%	37%	
Pendapatan Asli Daerah (retribusi pelayanan pasar)	460.016. 000	477.504. 000	512.580.0 00	1.248.660.0 00	1.121.618.4 00	440.501. 000	416.057.0 00	424.748.0 00	454.506.0 00	418.688.0 00	96%	87%	83%	36%	37%	
BELANJA DAERAH	14.574.1 48.406	18.371.6 73.006	27.934.64 8.329	37.098.025. 354	9.339.590.0 87	12.747.0 88.746	17.361.53 3.553	26.387.54 4.057	34.512.28 8.707	9.015.485. 685	87%	95%	94%	93%	97%	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Belanja Operasi	7.693.133.6 12	8.357.034.1 56	12.700.361 .506	8.540.797.85 4	5.734.797.4 87	7.395.530.7 46	7.476.148. 677	11.570.057. 263	7.946.600.6 14	5.451.147. 085	96%	89%	91%	93%	95%	-
a. Belanja Pegawai	3.834.340.5 60	3.243.420.8 56	3.683.509. 065	3.661.473.55 4	3.640.463.7 62	3.623.662.1 17	3.155.156. 824	3.607.696.8 06	3.564.558.7 17	3.543.813. 174	95%	97%	98%	97%	97%	-
b. Belanja Barang dan Jasa	3.858.793.0 52	5.113.613.3 00	9.016.852. 441	4.879.324.30 0	2.094.333.7 25	3.771.868.6 29	4.320.991. 853	7.962.360.4 57	4.382.041.8 97	1.907.333. 911	98%	84%	88%	90%	91%	
Belanja Modal	6.881.014.7 94	10.014.638. 850	15.234.286 .823	28.557.227.5 00	3.604.792.6 00	5.351.558.0 00	9.885.384. 876	14.817.486. 794	26.565.688. 093	3.564.338. 600	78%	99%	97%	93%	99%	

Tabel 2.7b
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 s.d 2020

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Adminsitarsi Perkantoran	na	678.60 1.000	615.031. 350	620.947. 800	411.739. 360	na	651.622. 143	593.393. 380	607.50 9.705	405.323. 685	na	96,02	96,48	97,84	98,44	465.263.9 02	451.569.7 83
2	Program Sarana dan Prasarana Aparatur	na	481.28 4.300	1.059.35 8.500	553.718. 500	73.365.6 00	na	439.121. 050	1.048.51 0.000	530.53 8.890	68.629.6 50	na		98,98	95,81	93,54	433.545.3 80	417.359.9 18
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	na	45.000. 000	-	-	-	na	27.839.0 00	-	-	-	na	61,86				9.000.000	5.567.800
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	na	-	-	-	-	na	-	-	-	-	na					-	-
5	Program Peningkatan Kualitas &	na	236.48 7.000	772.331. 500	363.261. 700	-	na	231.453. 400	760.743. 906	356.22 7.249	-	na	97,87	98,50	98,06		274.416.0 40	269.684.9 11

Rencana Strategis 2021-2026

	Produktivitas Tenaga Kerja																	
6	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	na	213.64 8.450	114.337. 650	91.400.0 00	48.855.5 00	na	205.116. 500	98.979.0 00	88.267. 300	48.829.5 00	na	96,01	86,57	96,57	99,95	93.648.32 0	88.238.46 0
7	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	na	61.655. 000	64.890.0 00	38.900.0 00	-	na	59.249.0 00	58.260.5 00	38.769. 500	-	na	96,10	89,78	99,66		33.089.00 0	31.255.80 0
8	Program Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan BLK Painan	na	-	22.498.0 00	21.278.5 00	-	na	-	22.470.9 99	20.278. 500	-	na			95,30		8.755.300	8.549.900
9	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Pelatih	na	-	-	11.806.3 00	-	na	-	-	10.782. 050	-	na					2.361.260	2.156.410
10	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	na	863.06 3.400	958.257. 000	4.570.03 4.800	3.451.85 8.750	na	802.346. 005	924.531. 990	3.751.4 35.950	3.389.63 2.850	na	92,96	96,48	82,09	98,20	1.968.642. 790	1.773.589. 359
	Total	na	2.579.7 39.150	3.606.70 4.000	6.271.34 7.600	3.985.81 9.210	na	2.416.74 7.098	3.506.88 9.775	5.403.8 09.144	3.912.41 5.685	na	541	567	665	390	3.288.721. 992	3.047.972. 340

Berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan dan bidang Transmigrasi tahun 2016-2021 pada tabel 2.6a dan 26b, dapat dijelaskan :

1. Urusan Perdagangan

- Ekspor perdagangan masih diangka 0, yang artinya hingga tahun 2020 belum adanya produk/ komoditi perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan yang mampu menembus pasar ekspor (ekspor produk/ komoditi yang menghasilkan devisa)
- Jumlah kelompok pedagang yang dibina mengalami peningkatan hingga tahun ke-3 RPJMD (2018), namun mengalami penurunan ke angka 0 tahun 2019 dan kembali mengalami kenaikan di titik tertinggi pada tahun 2020. Begitu juga dengan capaian target kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB, capaian kontribusi sektor perdagangan pada tahun 2019 hanya mencapai 95% terhadap target yang telah ditetapkan namun kembali naik 1% tahun 2020, hal ini dapat disebabkan oleh terjadinya shock perekonomian di awal pandemi Covid-19, dan dibutuhkan waktu secara bertahap untuk pemulihan.
- Kemudian jumlah sarana perdagangan berupa pasar yang menuju kriteria SNI, adalah 1 pasar yang masih tetap dipertahankan kelayakannya hingga tahun 2020, yaitu pasar kambing. Pasar ini dinilai dapat memenuhi beberapa kriteria dari 13 (tiga belas) kriteria penetapan pasar SNI

2. Urusan Perindustrian

- Trend penurunan capaian kontribusi sektor industri/ pengolahan terhadap PDRB dialami hingga tahun 2019 dan mulai meningkat kembali di tahun 2020. Hal ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan industri, puncak penurunan terjadi pada tahun 2020, mencapai angka 0,46. Pergeseran pola pemenuhan kebutuhan masyarakat yang mulai beralih dari mengolah produk (IKM) menjadi berdagang, dinilai sangat berpengaruh terhadap capaian kontribusi sektor industri.
- Cakupan bina kelompok pengrajin, persentase tenaga kerja dan jumlah produk yang bersertifikat juga mengalami penurunan di tahun 2020. Ini terjadi karena dampak covid-19 secara langsung pada pelaku IKM di Kabupaten Pesisir Selatan

3. Urusan Transmigrasi

- Dukungan fasilitas badan pengelola KTM mengalami penurunan di setiap tahun periode 2016-2020. Fasilitasi pelatihan dan pembinaan terhadap pengelola dan transmigran yang telah diberikan belum cukup optimal dalam mewujudkan kemandirian lembaga di KTM Lunang Silaut

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

A. Tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas

Tantangan yang harus dihadapi oleh dinas pelayanan dan transmigrasi dalam hal pelayanan adalah :

1. Keterbukaan pasar global melalui pasar online/*marketplace* nasional dan internasional memungkinkan masuknya produk luar negeri ataupun luar daerah untuk masuk dan bersaing dengan produk lokal, akibatnya pelaku usaha perdagangan dan perindustrian harus lebih berputar otak dan lebih kreatif dalam mengembangkan usahanya.
2. Pembangunan sentra IKM telah menjadi prioritas pengembangan Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dengan demikian, daerah harus lebih siap dalam hal pemberdayaan sumber daya manusia sentra IKM dengan memberikan pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan diperoleh hasil yang diharapkan

B. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas

Peluang yang harus dihadapi oleh Dinas pelayanan dan transmigrasi dalam hal pelayanan adalah :

1. Geliat pasar online sejak awal pandemi covid-19, memberikan alternatif baru perluasan akses pasar melalui jejaring sosial dan *marketplace*
2. Penerapan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Permendag No. 70 tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kab. Pesisir Selatan

Rencana Strategis (*Strategic Plan*) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan Visi dan Misi. Sehingga untuk mencapai tujuan akhir tersebut Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan harus menganalisa faktor internal (kekuatan/ *Stengths* dan kelemahan (*Weaknesses*) serta faktor eksternal (peluang/ *Opportunities* dan ancaman/ *Threats*) yang dihadapi oleh bidang perdagangan, perindustrian dan transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk menganalisa keempat faktor tersebut, maka digunakan metode perumusan strategi dan kebijakan secara sederhana melalui Analisa SWOT.

Analisis SWOT adalah indikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Stengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Dengan demikian, Analisa SWOT merupakan metode yang digunakan oleh Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan untuk menentukan strategi maupun kebijakan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun kedepan.

3.1.1 Analisa SWOT Bidang Perdagangan

Analisa Kekuatan (*Stengths*), Peluang (*Opportunities*), Kelemahan (*Weaknesses*) dan Ancaman (*Threats*) Bidang Perdagangan antara lain:

Kekuatan :

1. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya manusia yang cukup besar yang dapat diberdayakan secara maksimal untuk menunjang pertumbuhan sektor perdagangan Pesisir Selatan.

2. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan konsisten mengembangkan UMKM Kabupaten Pesisir Selatan tentunya termasuk UMKM yang berasal dari sektor Perdagangan.
3. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki sumber daya manusia yang cukup yang dapat di berdayakan secara maksimal untuk menunjang sektor pasar di Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Lingkup pengelolaan pasar, pengaturan tata ruang pasar, kebersihan dan keamanan pasar, pekerjaan bongkar muat dikoordinir dalam wadah yang juga berfungsi sebagai pengendali keamanan pasar.
5. Biaya Operasional dan pemeliharaan, rencana perbaikan jalan dilingkungan pasar dianggarkan.

Kelemahan :

1. Masih rendahnya profesionalisme dan jiwa wirausaha para pelaku usaha
2. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pasar tradisional.
3. Belum optimalnya pemantauan dan pengendalian harga barang pokok.
4. Masih rendahnya jumlah kemitraan dengan retail, *marketplace*, jasa akomodasi dan mitra lainnya dalam upaya perluasan akses pemasaran
5. Fasilitas pasar rakyat kurang terpelihara, drainase dan selokan tersumbat, dan jalan pasar menjadi kotor.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kalibrasi alat ukur/ tera, tera ulang UTTP
7. Produsen produk dan komoditi yang berpotensi ekspor masih kurang bergairah
8. Masih rendahnya pengawasan penyaluran/ distribusi pupuk

Peluang :

1. Adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi yang konsisten mendukung perkembangan perdagangan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Adanya rencana pemerintah untuk pengembangan kawasan pelabuhan Panasahan Kecamatan IV Jurai dan Pelabuhan Muaro Gadang Kecamatan Linggo Sari Baganti sehingga dapat mempercepat jalur distribusi barang dan jasa.

3. Penerapan Undang Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Permendag No. 70 tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional dan Toko Modern.
5. Perkembangan pasar tradisional, hotel, rumah makan serta objek wisata menunjukkan prospek baik yang ditindaklanjuti dengan meningkatkan sistim dan fasilitas pasar
6. Geliat pasar online sejak awal pandemi covid-19, memberikan alternatif baru perluasan akses pasar melalui jejaring sosial dan *marketplace*

Tantangan

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang antimonopoli dan persaingan tidak sehat.
2. Pasar online dari berbagai *marketplace* nasional maupun internasional, memberikan peluang bagi produk luar negeri ataupun dari luar daerah untuk masuk dan bersaing dengan produk lokal
3. Harga jual minyak sawit mentah (CPO) masih dtentukan oleh bursa komoditas di Belanda
4. Meningkatnya keberadaan pihak-pihak yang tidak relevan mempersulit pengendalian pengelola pasar sehingga mengurangi rasa aman, kenyamanan dan kebersihan lingkungan pasar.

3.1.2 Analisa SWOT Bidang Perindustrian

Analisa kekuatan (*Stengths*), peluang (*Opportunities*), kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) Bidang Perindustrian antara lain:

Kekuatan :

1. Besarnya potensi industri skala rumah tangga dan kecil.
2. Telah dibentuknya asosiasi/ organisasi usaha IKM.
3. Terbentuknya struktur organisasi dinas sebagai Pembina industri.
4. Adanya event-event promosi dan temu usaha bagi IKM dari Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Tersedianya database / direktori Industri Kecil Menengah (IKM) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

6. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan konsisten mengembangkan UMKM tentunya termasuk UMKM yang berasal dari sektor industri.

Kelemahan :

1. Masih terbatasnya Anggaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan untuk pembinaan industri.
2. Rendahnya SDM pelaku industri, terutama dalam hal :
 - a. Kewirausahaan, motivasi dan manajemen bisnis
 - b. Penguasaan teknologi produksi
 - c. Pengembangan produk yang berorientasi pada mutu
 - d. Daya inovasi (diversifikasi produk dan pengembangan kemasan)
 - e. Pengembangan produk yang berbasis sumber daya lokal.
3. Belum terwujudnya komitmen, konsistensi kebijakan dan keterpaduan berbagai pihak dalam pengembangan IKM.
4. Kurangnya jumlah tenaga ahli pembina dan penyuluh industri dan terbatasnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan teknis

Peluang :

1. Adanya visi, misi dan program unggulan Kabupaten Pesisir Selatan untuk pengembangan sektor industri unggulan
2. Terbukanya peluang kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga desain, Konsultan, Badan Riset dan Balai Pengujian.
3. Adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang konsisten mendukung perkembangan industri di daerah termasuk Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Adanya Peraturan Menteri Perdagangan tentang pelarangan ekspor produk asalan berupa produk-produk hasil kehutanan.
5. Sinergitas pengembangan produk lokal melalui peningkatan nilai tambah produk pangan/ kuliner khas daerah dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
6. Pemberlakuan SNI secara wajib terhadap beberapa produk industri
7. Kabupaten Pesisir Selatan berada pada posisi strategis di Pesisir Barat Sumatera.

8. Tersedianya Potensi Produk Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan di Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat mendukung perkembangan industri Kabupaten Pesisir Selatan
9. Sinergitas yang kuat antara program dan kegiatan Pemerintah yang ditetapkan melalui Permendagri nomor 90 tahun 2019 dengan Implementasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019-2039

Tantangan :

1. Sebagian industri Kabupaten Pesisir Selatan masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan komponen dari luar daerah.
2. Tingginya biaya faktor produksi produk IKM mengakibatkan kurangnya daya saing produk IKM.
3. Masih adanya kecenderungan masyarakat menyukai produk luar negeri.

3.1.3 Analisa SWOT Bidang Transmigrasi

Analisa Kekuatan (*Strengths*), Peluang (*Opportunities*), Kelemahan (*Weaknesses*) dan Ancaman (*Threats*) Bidang Transmigrasi antara lain:

Kekuatan :

1. Sumber daya manusia transmigran yang cukup baik, dari segi kewirausahaan dan motivasi bisnis.
2. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan konsisten mengembangkan dan memberikan fasilitasi peningkatan SDM masyarakat transmigrasi

Kelemahan :

1. Belum maksimalnya pengelolaan kelembagaan ekonomi, sosial dan budaya di kawasan transmigrasi
2. Masih kurangnya sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi
3. Percepatan penyelesaian urusan pencadangan tanah pembukaan wilayah transmigrasi baru, masih perlu ditingkatkan
4. Kurangnya SDM transmigran, terutama dalam hal mencari dan memanfaatkan peluang pengembangan usaha

5. Konservasi lahan dan kesadaran akan pelestarian sumber daya air masih kurang
6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan di kawasan transmigrasi

Peluang :

1. Adanya sinergitas dan dukungan yang baik dan berkelanjutan dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terkait Pengembangan Kawasan Transmigrasi meliputi penguatan SDM, infrastruktur, sosial ekonomi dan kelembagaan, pengelolaan aset dan pengendalian pemanfaatan ruang
2. Dukungan dari OPD lain yang beririsan dalam hal mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan

Tantangan

1. Konsistensi pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam memfasilitasi pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana di KTM Lunang Silaut

Berdasarkan Analisa SWOT diatas, maka dapat disimpulkan Permasalahan Utama Dinas Perdagangan dan Transmigrasi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengelolaan & Penataan Pasar
2. Masih adanya sarana dan prasarana pasar yang perlu dilakukan revitalisasi dan pemeliharaan
3. Belum optimalnya pemantauan nilai konsumsi dari penjualan ketersediaan stok bahan kebutuhan pokok, dan pengendalian harga barang pokok
4. Belum maksimal peran serta masyarakat di bidang IKM dalam pengembangan potensi industri unggulan
5. Kurangnya SDM Pelaku Industri yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing
6. Rendahnya kesadaran pelaku IKM terhadap perizinan/legalitas usaha
7. Keterbatasan Teknologi Produksi IKM
8. Belum maksimal pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan KTM Lunang Silaut

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Visi merupakan pernyataan untuk mengubah kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik . Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 adalah

“Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermatabat, Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional”

Penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

- Sejahtera : Meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, serta peningkatan akses pelayanan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
- Maju : : Terwujudnya masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, profesional, berperadaban tinggi, berdaya saing, berakhlak mulia serta memiliki wawasan ke depan.
- Bermatabat : Kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertumpu pada nilai-nilai budi pekerti dan budaya yang luhur, mengedepankan ABS-SBK (Adat Barsandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah)..
- Akuntabel : Memberikan pertanggungjawaban atau menjelaskan kinerja atas tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- Profesional : Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik, semakin transparan dan efektifnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun kedepan, maka untuk “Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermatabat, Didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional ” dilaksanakan melalui lima misi yaitu :

1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat
3. Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan.
5. Mewujudkan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing.
6. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.

Berdasarkan 6 (enam) misi yang ada dapat dilihat bahwa misi ke 1, misi 2 dan misi 3 berkaitan dengan tupoksi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, yakni :

- Misi ke 1 : **Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan**
- Misi ke 2 : **Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat**
- Misi ke 3 : **Memperkuat kemandirian ekonomi dengan mendorong sektor potensi dan unggulan daerah**

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi sebagai Leading Sektor bidang perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan berupaya mendorong peningkatan produksi dan nilai tambah Bidang Perdagangan dan Perindustrian serta kemandirian dan Kualitas Hidup masyarakat transmigrasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui program-program pembinaan berkelanjutan.

Adapun program program prioritas yang akan dilakukan selama periode renstra ini adalah pengembangan produk/komoditi unggulan melalui peran sektor industri dan sektor perdagangan. Sektor industri yang akan dikembangkan sesuai

dengan potensi yang dimiliki dan diarahkan kepada industri yang mengolah bahan baku lokal berupa produk yang berbasis hasil laut, perkebunan dan pertanian serta mendukung Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Kota Wisata dengan pengembangan industri kreatif.

Untuk pengembangan kegiatan industri khususnya industri kecil menengah akan dilakukan pengembangan kelompok Industri Kecil Menengah berdasarkan komoditas, seperti industri kecil pangan, industri kerajinan rotan, industri sulaman bayangan dan aplikasi timbul, industri batik tanah liat dan industri kerajinan lainnya.

Untuk mendorong pemasaran produk unggulan daerah bidang perdagangan berupaya memperluas jaringan informasi perdagangan, menjaga kelancaran logistik dan arus barang, pengawasan terhadap barang yang beredar, tertib aturan perdagangan, pemantauan harga pasar dan evaluasi perdagangan serta pemberdayaan konsumen cerdas.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sumatera Barat serta Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat

Pada bagian ini kita akan melakukan telaahan terhadap renstra Kementrian Lembaga dan Dinas Provinsi terkait. Kementrian lembaga yang kita telaahan yang terkait dengan tupoksi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan yakni Renstra Kementrian Perdagangan Republik Indonesia, Renstra Kementrian Perindustrian Republik Indonesia dan Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Sedangkan untuk Dinas Provinsi terkait, kita akan melakukan telaahan terhadap Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat antara lain:

- a. Penekanan Sasaran Jangka menengah Renstra Kementrian Perdagangan Republik Indonesia tahun 2020 - 2024 yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
 1. Terjaganya stabilitas harga dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting

2. Meningkatnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha yang Bertanggungjawab
 3. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat di Bidang Kemetrolagian
 4. Meningkatnya Kinerja Daerah di Bidang Kemetrolagian
 5. Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Bidang Perlindungan Konsumen
 6. Meningkatnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
 7. Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Pelaku Usaha dan Sarana Perdagangan
- b. Penekanan Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia tahun 2020 - 2024 yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
1. Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri
 2. Tersedianya regulasi pembangunan industri yang efektif
 3. Terwujudnya sistem informasi industri yang berkualitas
- c. Penekanan Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian desa, PDT dan Transmigrasi Republik Indonesia tahun 2020 - 2024 yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
1. Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi
 2. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpadaun rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi.
 3. Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi
- d. Penekanan Sasaran Jangka menengah Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
1. Meningkatnya pertumbuhan industri
 2. Meningkatnya unit usaha industri unggulan

3. Meningkatkan peranan perdagangan dalam negeri dan perlindungan terhadap konsumen
 4. Menjaga stabilitas perdagangan dalam negeri
 5. Meningkatnya pangsa pasar dan stabilitas harga
 6. Meningkatkan daya saing pasar rakyat
 7. Meningkatnya kualitas pasar rakyat
 8. Meningkatnya penguatan kinerja pengujian dan sertifikasi mutu barang, kemetrolagian serta pengawasan barang dan jasa beredar
- e. Penekanan Sasaran Jangka menengah Renstra Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:
1. Meningkatnya pendapatan masyarakat di kawasan transmigrasi
 2. Meningkatnya kesejahteraan transmigran

Berdasarkan telaahan dari Kementrian Lembaga dan Propinsi maka terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:

a. Faktor Penghambat :

1. Terbatasnya kesempatan aparatur untuk mengikuti pendidikan teknis perdagangan dan perindustrian.
2. Sulitnya mengubah kebiasaan pelaku usaha terutama industri kecil rumah tangga dalam proses produksi.
3. Kurangnya koordinasi antar OPD terkait dalam rangka penyusunan dan pemetaan potensi industri dan perdagangan.
4. Masih ditemukan peredaran produk-produk impor ilegal dipasaran.
5. Terbatasnya kawasan/wilayah untuk pembangunan pasar rakyat.
6. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam melakukan standarisasi dan sertifikasi produk industri dan perdagangan di Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Masih rendahnya kualitas pendataan jumlah transmigran di wilayah transmigrasi

b. Faktor pendorong

1. Tersedianya anggaran baik melalui APBD II, APBD I dan APBN.

2. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi industri pangan yang cukup besar yang tersebar di seluruh kenagarian dan kecamatan.
3. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki potensi industri unggulan yang merupakan warisan budaya lokal seperti sulaman, border dan kerajinan rotan.
4. Telah tersedianya RTRW Kabupaten Pesisir Selatan
5. Telah tersedianya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Pesisir Selatan
6. Karakter masyarakat sebagai pedagang.
7. Dengan dijadikannya Kabupaten Pesisir Selatan sebagai daerah tujuan wisata maka hal ini dapat menjadi peluang bagi berkembangnya industri dan perdagangan penunjang pariwisata

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2011-2030, bahwa tujuan dilaksanakannya penataan ruang adalah : "Mewujudkan Keterpaduan Ruang Yang Memberikan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan Sampai Tahun 2030 Melalui Konservasi, Pengembangan Ekonomi Berbasis Pangan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pariwisata Dan Mitigasi Bencana Secara Berkelanjutan "

Perwujudan pola tata ruang dan kajian terhadap lingkungan hidup juga memberi implikasi terhadap pengembangan pelayanan di bidang Perdagangan dan Perindustrian. Adapun kajian lingkungan hidup harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi terhadap stakeholder baik dari instansi pemerintah, BUMD, Lembaga Aktivistik Lingkungan Hidup dan Swasta. Pembangunan sarana dan prasarana yang Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan akan mempedomani aturan-aturan yang berlaku terkait lingkungan hidup terutama mengenai AMDAL antara lain :

- Pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat
- Pembangunan sentra IKM

- Pembangunan Kawasan Transmigrasi Mandiri (KTM)

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil Analisa SWOT terhadap faktor Internal dan Eksternal Dinas Perdagangan dan Transmigrasi serta mereview hasil telaahan komponen-komponen yang terkait, maka dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan antara lain:

1. Peningkatan omset perdagangan komoditi daerah

Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB Kabupaten Pesisir Selatan dipengaruhi oleh aktifitas perdagangan dalam negeri. Untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB diperlukan peningkatan omset pelaku usaha perdagangan dalam negeri. Saat ini permasalahan yang dihadapi pelaku usaha perdagangan dalam negeri antara lain:

- a. Keterbatasan akses pasar dan jaringan pemasaran;
- b. Sarana dan prasarana perdagangan masih kurang;
- c. Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha perdagangan yang meliputi :
Kewirausahaan, motivasi dan manajemen bisnis

Berbagai aktivitas Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dalam rangka peningkatan perdagangan dalam negeri perlu dilakukan antara lain:

- a. Pemasaran produk
- b. Rehab dan peningkatan sarana perdagangan
- c. Pembinaan pelaku usaha perdagangan dalam negeri
- d. Pembinaan dan pengawasan serta koordinasi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga
- e. Menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting.

2. Peningkatan nilai tambah produk IKM

Daya saing produk IKM Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikatakan cukup rendah dibandingkan dengan produk IKM kabupaten lain di Sumatera barat, hal ini terlihat belum banyaknya produk IKM yang menembus pasar

dalam negeri, luar negeri. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah rendahnya kualitas produk terutama produk pangan, kerajinan rotan, kerajinan kulit dan tas, sulaman dan bordir dan lainnya. Produk yang berkualitas dan berdaya saing dapat dicapai dengan perbaikan proses produksi, yang pada akhirnya meningkatkan nilai tambah industri.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah tersebut, pemerintah daerah menfokuskan pembinaan pada sektor unggulan terutama yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Dalam hal ini, upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan :

4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan teknis dan manajemen, standarisasi dan sertifikasi produk IKM, serta membangun kemitraan dengan swasta/ BUMN/BUMD, lembaga pengujian dan desain produk serta perguruan tinggi. ,
5. Penyediaan sarana dan prasarana melalui bantuan peralatan produksi pada kelompok IKM potensial,
6. Pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan kelompok-kelompok IKM melalui fasilitasi pembangunan sentra IKM unggulan

3. Kemandirian Lembaga dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi

Kemandirian lembaga dan infrastruktur kawasan transmigrasi di Kabupaten Pesisir Selatan ditentukan oleh 2 (dua) hal yaitu :

1. Jumlah lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif dan mandiri secara finansial di Kawasan transmigrasi
2. Jumlah sarana prasarana pendukung aktivitas perekonomian masyarakat transmigrasi.

Untuk mewujudkan kemandirian ini diperlukan sinergitas beberapa aspek. Namun dalam perkembangannya, terdapat beberapa kendala yang ditemui antara lain :

1. Belum optimalnya kinerja lembaga masyarakat di kawasan transmigrasi
 - a. Belum optimalnya pengelolaan Kota Terpadu Mandiri (KTM)

Lunang Silaut.

- b. Masih kurangnya pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, kelautan, perikanan dan perkebunan di kawasan transmigrasi
 - c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat transmigran terhadap peduli lingkungan terutama untuk menjaga hutan lindung dan lahan gambut
2. Kurangnya pemanfaatan sarana, prasarana/ infrastruktur di kawasan transmigrasi

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur.

Adapun rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan beserta tabel indikatornya terdapat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2021-2026

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik	Nilai Reformasi Birokrasi OPD						B
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Hasil penilaian AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A
2	Meningkatnya Perekonomian masyarakat di Kawasan Transmigrasi	Pengeluaran per kapita masyarakat di kawasan Transmigrasi	≥ 9.212.000	≥ 9.325.000	≥ 9.369.000	≥ 9.534.000	≥ 9.734.000	≥ 9.949.000
	Meningkatnya kemandirian Kawasan Transmigrasi	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi (Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan, Jejaring Prasarana, Kelembagaan)	41,10	68,07	72,08	76,10	77,00	78,00
3	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Nilai PDRB Sektor Pengolahan (ADHK) (Rp. Milyar)	703,61	707,32	708,48	712,63	717,06	722,07
		Nilai PDRB Sektor Perdagangan (ADHK) (Rp. Milyar)	1287.19	1338.03	1418.91	1517.55	1635.29	1784.86
	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Laju Pertumbuhan sektor Perdagangan	2,30%	3,80%	5,70%	6,50%	7,20%	8,38%
		Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	1.00%	2.00%	3.20%	4.50%	5.30%	6,70%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk keterarahan pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran visi serta misi, dan untuk pemantapkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal diperlukan penetapan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi.

Strategi adalah suatu pernyataan yang luas mengenai tindakan-tindakan yang akan dilakukan serta arah yang dituju diwaktu yang akan datang. Adapun strategi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, kebijaksanaan yang dimaksudkan dalam cara pencapaian tujuan dan sasaran harus disusun oleh organisasi dengan berdasarkan dari pimpinan pucuk organisasi. Adapun keterkaitan antara Visi, Misi Kepala Daerah dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan dari Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1

Hubungan Hirarki Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan

Pembangunan Sektor Perdagangan, Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2021-2026

VISI : MEWUJUDKAN PESISIR SELATAN LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERMARTABAT, DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL DAN PROFESIONAL			
MISI 1	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Meningkatkan kualitas layanan internal Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Peningkatan fasilitas layanan umum Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
			Peningkatan Kualitas SDM Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
			Peningkatan kualitas dokumen pelayanan publik Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
			Peningkatan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan dan aset
		Meningkatkan kualitas perencanaan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	Peningkatan kualitas pelaksanaan Prog dan Keg Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
			Peningkatan realisasi keuangan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
MISI 2	Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat		
Meningkatnya ekonomi masyarakat di Kawasan Transmigrasi	Meningkatnya kemandirian Kawasan Transmigrasi	Tersedianya lahan kawasan transmigrasi yg memenuhi kriteria	Penyediaan Tanah pembangunan kawasan transmigrasi
			Penataan pemukiman kawasan transmigrasi

			Pemindahan dan penempatan masyarakat transmigrasi
		Terlaksananya pengembangan kawasan transmigrasi	Peningkatan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur penunjang sosial dan ekonomi masyarakat kawasan transmigrasi
			Peningkatan kapasitas SDM masyarakat transmigrasi
MISI 3	Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah		
Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Meningkatnya Daya Saing Sektor Perindustrian dan Perdagangan	Meningkatkan Omset Perdagangan	Peningkatan pangsa pasar produk/ komoditi
			Meningkatkan Standarisasi Alat Ukur dan Perlindungan Konsumen
			Meningkatkan Legalitas Usaha Perdagangan
		Terwujudnya stabilitas ketersediaan dan harga bahan pokok dan barang penting di pasar	Pengendalian Harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting
			Peningkatan pengawasan terhadap distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi
		Meningkatkan Omset Industri	Tercapainya Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten sesuai dengan RPIK Melalui : Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Industri, meningkatkan sarana prasarana industri pengolahan, meningkatkan pemberdayaan industri pengolahan dan peran serta masyarakat
			Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sistem Informasi Industri
			Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Legalitas Industri

Cross-Cutting Program

Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	OPD Terkait
Memfasilitasi pembukaan transmigrasi lokal di kawasan transmigrasi	1. Peningkatan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur penunjang sosial dan ekonomi masyarakat kawasan transmigrasi 2. Peningkatan kapasitas SDM masyarakat transmigrasi	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana 3. Dinas Koperasi, usaha kecil dan menengah dan tenaga kerja 4. Dinas Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu 5. Dinas perikanan dan pangan 6. Dinas pertanian 7. Kecamatan Lunang 8. Kecamatan Silaut
Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk unggulan	Peningkatan pengawasan terhadap distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi	1. Dinas Pertanian & Peternakan : Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Sekretariat Daerah (Bid perekonomian) : Koordinator Tim KP3 (Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Bersubsidi)

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021-2026

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas

Dari strategi dan kebijakan yang diambil, maka Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan antara lain :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

- I Administrasi keuangan perangkat daerah
 - 1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 2 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
- II Administrasi umum Perangkat Daerah
 - 1 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - 2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - 5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 6 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 7 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 8 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- III Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1 Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik
 - 2 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- IV Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1 Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - 2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 3 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya
- 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- V Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 1 Evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- VI Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

- I Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tk Daerah Kabupaten / Kota
 - 1 Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan
 - 2 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi
- II Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota
 - 1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
 - 2 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1(satu) Kabupaten / Kota.
- III Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tk Daerah Kabupaten / Kota
 - 1 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tk Agen dan Pasar Rakyat.

PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

- I Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - 1 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang
 - 2 Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal

PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

- I Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - 1 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri ditingkat Kabupaten/Kota

- 2 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
- 3 Peningkatan sistem jaringan dan jaringan informasi perdagangan

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

- I Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1 Pameran Dagang Nasional
 - 2 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

- I Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan
 - 1 Penyediaan sarana Distribusi perdagangan
- II Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
 - 1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

- I Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
 - 1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
- II Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
 - 1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

- I Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota
 - 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri

- 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
- 3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA

- I Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
 - 1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/ Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 - 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

- I Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - 1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
 - 2 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/ Kota

PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI

- I Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
 - 1 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi
 - 2 Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan
 - 3 Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi

PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI

- I Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
 - 1 Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran

- 2 Pindahan dan Penempatan Transmigran yang
Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI

- I Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan (Satu) Daerah Provinsi
 - 1 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman
 - 2 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka
Pemantapan Satuan Permukiman

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 pada lampiran

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dijadikan pedoman dalam menyusun Renstra OPD yang hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Bupati Pesisir Selatan dengan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Pesisir Selatan dibantu oleh Kepala Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
3. Seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Perangkat Daerah, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah untuk dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun;
5. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 dengan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
6. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Penyusunan RKPD Kabupaten Pesisir Selatan harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara

- berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Nagari, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten;
8. RKPD Kabupaten Pesisir Selatan menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-Perangkat Daerah) yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai;
 9. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, utamanya sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
 10. Renja Perangkat Daerah yang disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah);
 11. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan berkewajiban untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang akan dijadikan bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya;
 12. Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan keuangan daerah dan lain-lain dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahunnya.

Secara lengkap indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan yang mengacu pada RPJMD sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut 7.1 dan 7.2 berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Reformasi Birokrasi OPD	NA						65 (B)	65 (B)
2	Pengeluaran per kapita masyarakat di kawasan Transmigrasi (Rp/org/thn)	NA	≥ 9.212.000	≥ 9.325.000	≥ 9.369.000	≥ 9.534.000	≥ 9.734.000	≥ 9.949.000	≥ 9.949.000
3	Nilai PDRB sektor industri pengolahan (ADHK) (Rp. Milyar)	700,37	703,61	707,32	717,93	730,85	745,47	761,87	761,87

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	URUSAN PERINDUSTRIAN								
1	Pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah	1,20%	1,96%	2,30%	2,61%	4,62%	5,70%	6,28%	23,47%
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	NA	0,00%	14,20%	18,50%	22,00%	25,20%	30,00%	30,00%
3	Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	10%	15%	20%	25%	30%	30%
5	Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	0	5%	8%	10%	12%	15%	15%
6	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Lanjutan Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Akhir RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	URUSAN PERDAGANGAN								
1	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)	50%	52%	55%	57%	60%	62%	65%	65%
2	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	n/a	16,0%	16,2%	17,0%	18,0%	19,0%	20,0%	20,0%
3	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	0,37%	0,40%	0,45%	0,48%	0,50%	0,53%	0,55%	0,55%
	URUSAN TRANSMIGRASI								
1	Jumlah lembaga ekonomi dan sosial di kawasan transmigrasi	NA	10 lembaga	15 lembaga	20 lembaga	25 lembaga	30 lembaga	35 lembaga	35 lembaga

BAB VIII PENUTUP

Dokumen Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2026. Dokumen ini selain berisi rencana kegiatan-kegiatan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi juga menggambarkan besarnya anggaran yang dibutuhkan. Renstra mencakup berbagai indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian rencana yang sudah dirumuskan tersebut.

Dokumen Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan dokumen renstra didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan stratejik bersifat sangat dinamis, sehingga selalu terbuka kemungkinan bagi proses perubahan dalam dokumen Renstra. Dalam konteks dokumen Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan ini, perubahan tersebut juga masih dimungkinkan untuk proses penyesuaian dalam lingkungan strategi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dalam kurun waktu 2021-2026.

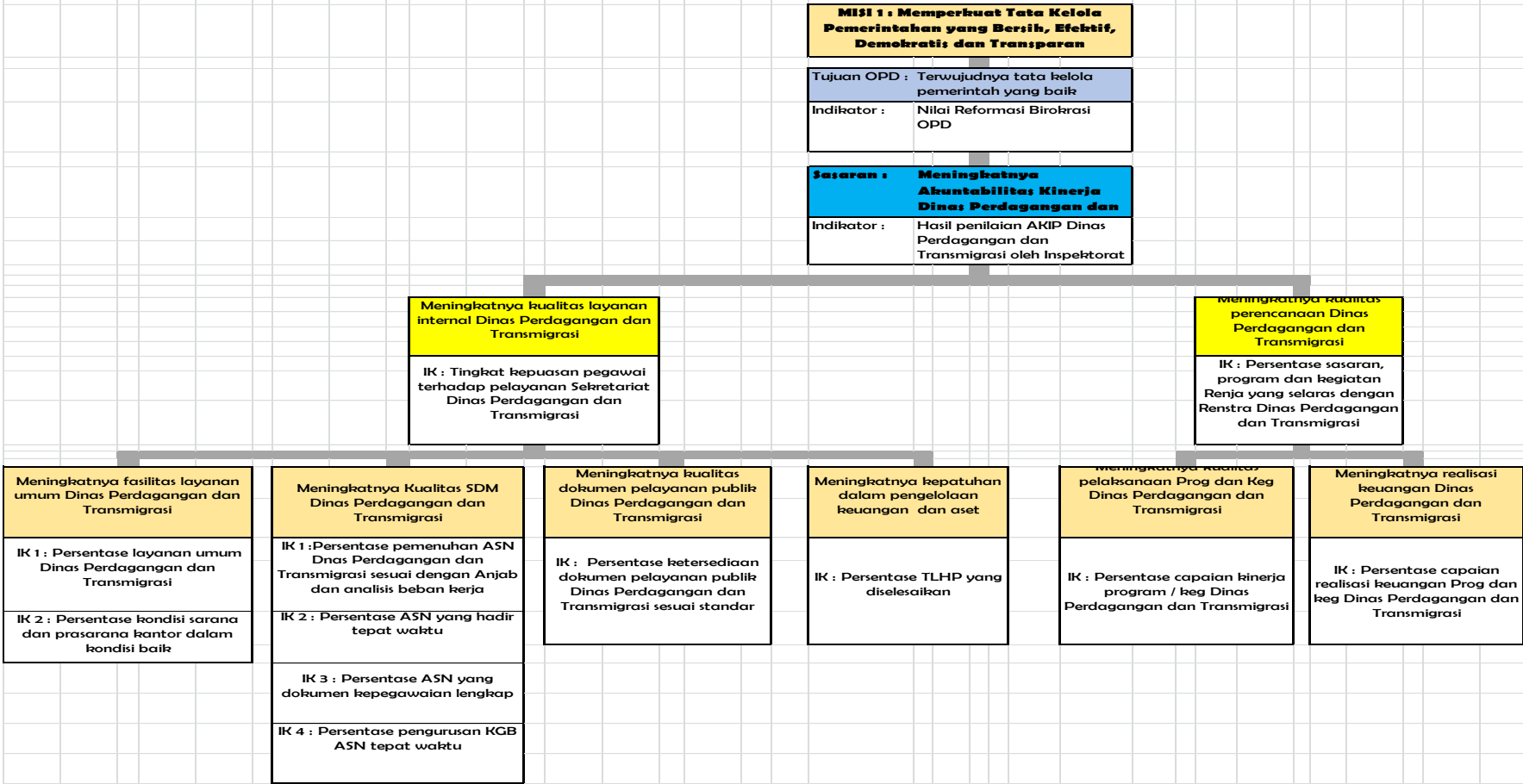
Demikian Dokumen Renstra ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan data, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

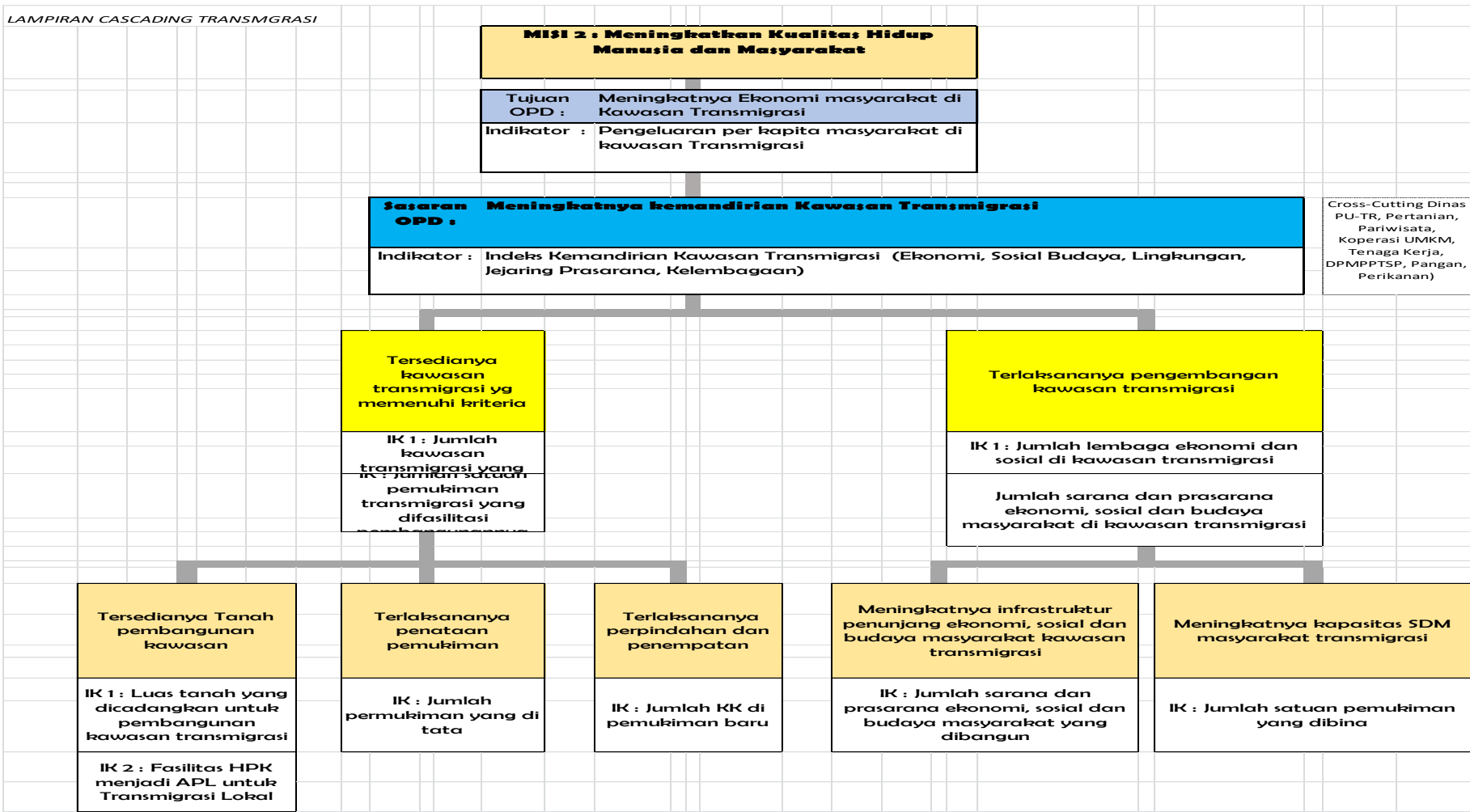
Paiman, Desember 2021
BUPATI PESISIR SELATAN

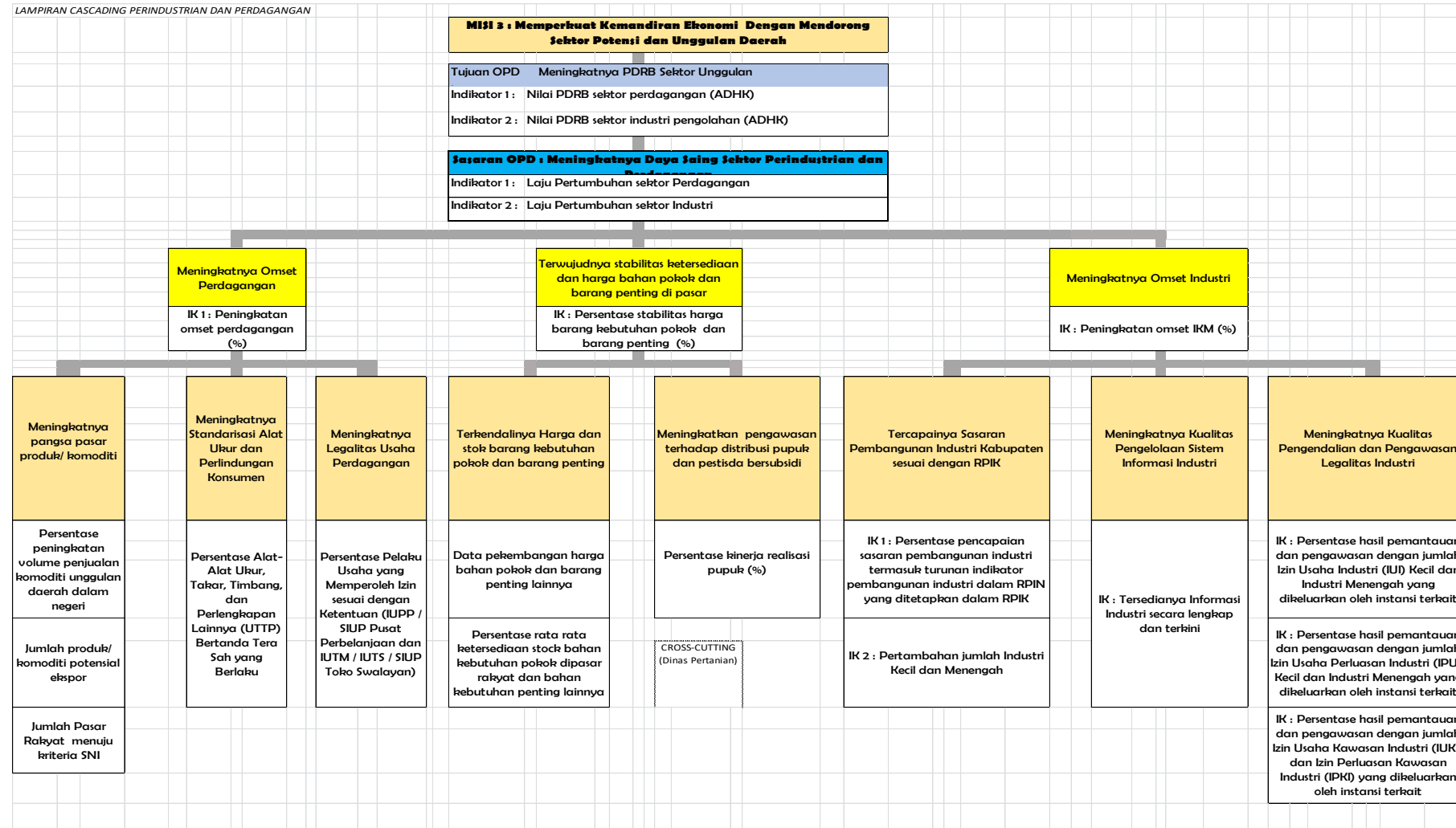
Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

LAMPIRAN

LAMPIRAN CASCADING SEKRETARIAT







LAMPIRAN PENJELASAN CASCADING									
TUJUAN OPD									
No	Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Nilai Reformasi Birokrasi OPD	NA						B	B
2	Pengeluaran per kapita masyarakat di kawasan Transmigrasi (Rp/org/thn)	NA	≥ 9.212.000	≥ 9.325.000	≥ 9.369.000	≥ 9.534.000	≥ 9.734.000	≥ 9.949.000	≥ 9.949.000
3	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK) (Rp. Milyar)	700,37	703,61	707,32	717,93	730,85	745,47	761,87	761,87
4	Nilai PDRB Sektor Perdagangan (ADHK) (Rp. Milyar)	1 257,58	1287,185	1338,030	1418,908	1517,549	1635,290	1784,861	1784,861
SASARAN OPD									
No	Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Hasil penilaian AKIP Dinas Perdagangan dan Transmigrasi oleh Inspektorat	NA	A	A	A	A	A	A	A
2	Indeks Kemandirian Kawasan Transmigrasi	NA	41,10	68,07	72,08	76,10	77,00	78,00	78,00
3	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Perdagangan	-0,39%	2,30%	3,80%	5,70%	6,50%	7,20%	8,38%	8,38%
4	Laju Pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan	-3,08	1,00%	2,00%	3,20%	4,50%	5,30%	6,70%	6,70%

OUTCOME									
No	Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan Sekretariat Dinas Perdagangan dan	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja yang selaras dengan Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	NA	0 kawasan	0 kawasan	0 kawasan	0 kawasan	1 kawasan	0 kawasan	1 kawasan
4	Jumlah pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	NA	0 pemukiman	0 pemukiman	0 pemukiman	0 pemukiman	0 pemukiman	1 pemukiman	1 pemukiman
5	Jumlah lembaga ekonomi dan sosial di kawasan transmigrasi	NA	10 lembaga	15 lembaga	20 lembaga	25 lembaga	30 lembaga	35 lembaga	35 lembaga
6	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di kawasan transmigrasi	NA	17 Unit	18 Unit	19 Unit	20 Unit	21 Unit	22 Unit	22 Unit
7	Peningkatan omset perdagangan	1,5 %	5,90%	6,20%	7%	7,40%	8,30%	9%	44%
8	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	NA	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%	<9%
9	Peningkatan omset IKM	1,29%	1,80%	2%	2,20%	2,50%	2,70%	3,50%	15%

LAMPIRAN LANJUTAN PENJELASAN CASCADING

OUTPUT									
No	Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase layanan umum Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	NA	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
3	Persentase pemenuhan ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi sesuai dengan Anjab dan analisis beban kerja	NA	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
4	Persentase ASN yang hadir tepat waktu	NA	80%	80%	85%	90%	95%	98%	98%
5	Persentase ASN yang dokumen kepegawaian lengkap	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Persentase pengurusan KGB ASN tepat waktu	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik Dinas Perdagangan dan Transmigrasi sesuai standar	NA	80%	80%	83%	85%	86%	87%	87%
8	Persentase TLHP yang diselesaikan	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase capaian kinerja program / keg Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	NA	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
10	Persentase capaian realisasi keuangan Prog dan keg Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	NA	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
11	Luas tanah yang dicadangkan untuk pembangunan kawasan transmigrasi	NA	0 Hektar	0 Hektar	0 Hektar	0 Hektar	30 Hektar	0 Hektar	30 Hektar
12	Fasilitas HPK menjadi APL untuk Transmigrasi Lokal	NA	0 HPK	0 HPK	1 HPK	1 HPK	0 HPK	0 HPK	2 HPK
13	Jumlah permukiman yang di tata	NA	0 Pemukiman	0 Pemukiman	0 Pemukiman	0 Pemukiman	0 Pemukiman	1 Pemukiman	1 Pemukiman
14	Jumlah KK di pemukiman baru	NA	0 KK	0 KK	0 KK	0 KK	0 KK	90 KK	90 KK
15	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang dibangun	NA	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	6 unit
16	Jumlah satuan pemukiman yang dibina	NA	0 pemukiman	1 pemukiman	1 pemukiman	1 pemukiman	1 pemukiman	1 pemukiman	5 pemukiman
17	Persentase peningkatan volume penjualan komoditi unggulan daerah dalam negeri	NA	2%	2%	2%	2%	2%	2%	12%
18	Jumlah produk/ komoditi potensial ekspor	NA	0 produk	2 produk	2 produk	2 produk	2 produk	2 produk	10 produk
19	Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	NA	1 pasar	1 pasar	1 pasar	1 pasar	1 pasar	2 pasar	2 pasar
20	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	NA	0,40%	0,45%	0,48%	0,50%	0,53%	0,55%	0,55%
22	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)	NA	52,00%	55,00%	57,00%	60,00%	62,00%	65,00%	65,00%

LAMPIRAN LANJUTAN PENJELASAN CASCADING									
No	Indikator	Kondisi Awal (2020)	Target						Kondisi Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
23	Data perkembangan harga bahan pokok dan barang penting lainnya	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	24 dokumen
24	Persentase rata rata ketersediaan stock bahan kebutuhan pokok dipasar rakyat dan bahan kebutuhan penting lainnya	NA	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
25	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	NA	16,00%	16,2%	17%	18%	19%	20%	20,00%
26	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	NA	0,00%	14,20%	18,50%	22,00%	25,20%	30,00%	30,00%
27	Pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah	1,20%	1,96%	2,30%	2,61%	4,62%	5,70%	6,28%	23,47%
28	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini	NA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
29	Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
30	Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	NA	0%	0%	0%	0%	0%	90%	90%
31	Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarkan oleh instansi terkait	NA	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

LAMPIR

AN

TABEL 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAUN 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN /PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADAT TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Capaian kinerja akhir periode renstra perangkat daerah		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
							2021	2022		2023		2024		2025		2026					
							TARGET	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK	MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERDAGANGAN		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan Sekretariat Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		100 %	100 %	4.59 4.91 0.15 6	100 %	5.09 2.65 5.66 4	100 %	5.21 9.31 5.44 7	100 %	5.68 0.28 1.21 9	100 %	5.96 4.29 5.28 0	100 %	31.4 47.2 97.8 37	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI	

		DAN TRAN SMIG RASI																		
					Persentase sasaran, program dan kegiatan Renja yang selaras dengan Renstra Dinas Perdagang an dan Transmigrasi		100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
				I Administras i keuangan perangkat daerah	Persentase capaian realisasi keuangan Prog dan keg Dinas Perdagang an dan Transmigrasi		90%	90%	3.94 5.53 6.66 8	90%	4.14 2.81 3.50 1	90%	4.34 9.95 4.17 6	90%	4.56 7.45 1.88 5	90%	4.79 5.82 4.48 0	90%	26.0 98.5 57.5 80	
					Persentase capaian kinerja program / keg Dinas Perdagang an dan		90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%		

					Transmigrasi															
					Persentase pemenuhan ASN Dnas Perdagangan dan Transmigrasi sesuai dengan Anjab dan analisis beban kerja		80%	80%		80%		80%		80%		80%		80%		
					Persentase ASN yang hadir tepat waktu		80%	80%		85%		90%		95%		98%		98%		
					Persentase ASN yang dokumen kepegawaian lengkap		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
					Persentase pengurusn KGB ASN tepat waktu		100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
				1 Penyediaan gaji dan tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima		37 orang	38 orang	3.807.613.055	38 orang	3.997.993.70	38 orang	4.197.893.39	38 orang	4.407.788.06	38 orang	4.628.177.46	228 orang	25.188.442.5	

				n ASN	Gaji dan Tunjangan ASN					8		3		3		6		54	
				2 Penyedia an administ rasi pelaksan aan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaa n Administra si Pelaksana an Tugas ASN		8 dok ume n	8 dok ume n	137. 923. 613	8 dok ume n	144. 819. 794	8 dok ume n	152. 060. 783	8 dok ume n	159. 663. 822	8 dok ume n	167. 647. 014	48 dok ume n	910. 115. 026
				I I Administras i umum Perangkat Daerah	Persentase layanan umum Dinas Perdagang an dan Transmigr asi		100 %	100 %	173. 111. 930	100 %	181. 767. 527	100 %	245. 855. 903	100 %	258. 148. 698	100 %	271. 056. 133	100 %	1.37 8.86 7.43 2
				1 Penyedia an kompone n instalasi listerik/ peneran gan banguna n kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pe nerangan Bangunan Kantor yang disediakan		1 pak et	1 pak et	4.53 1.12 0	1 pak et	4.75 7.67 6	1 pak et	4.99 5.56 0	1 pak et	5.24 5.33 8	1 pak et	5.50 7.60 5	6 pak et	31.0 81.7 98
				2 Penyedia an Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		3 pak et	3 pak et	31.5 47.8 20	3 pak et	33.1 25.2 11	3 pak et	34.7 81.4 72	3 pak et	36.5 20.5 45	3 pak et	38.3 46.5 72	18 pak et	249. 309. 832

				3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan		8 paket	8 paket	15.604.990	8 paket	16.385.240	8 paket	17.204.501	8 paket	18.064.727	8 paket	18.967.963	48 paket	119.314.450	
				4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		36 eksplar	36 eksplar	5.400.000	36 eksplar	5.670.000	36 eksplar	5.953.500	36 eksplar	6.251.175	36 eksplar	6.563.734	180 eksplar	39.738.409	
				5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	0	-	0	-	2 paket	20.000.000	2 paket	21.000.000	2 paket	22.050.000	6 paket	63.050.000	
				6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan		0	0	-	0	-	4 paket	35.000.000	4 paket	36.750.000	4 paket	38.587.500	12 paket	110.337.500	
				7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 laporan	12 laporan	4.168.000	12 laporan	4.376.400	12 laporan	4.595.220	12 laporan	4.824.981	12 laporan	5.066.230	72 laporan	62.593.331	

				8	Penyelen ggaraan rapat koordina si dan konsulta si SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60 lapo ran	70 lapo ran	111. 860. 000	80 lapo ran	117. 453. 000	90 lapo ran	123. 325. 650	100 lapo ran	129. 491. 933	110 lapo ran	135. 966. 529	510 lapo ran	703. 442. 112	
				I I I	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Peerintah Daerah	Persentase layanan umum Dinas Perdagang an dan Transmigr asi		90%	90%	264. 456. 328	90%	277. 679. 144	90%	291. 563. 102	90%	306. 141. 257	90%	321. 448. 320	90%	1.70 8.95 5.95 0	
				1	Penyedia an jasa Komunik asi ,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediaka n		12 lapo ran	12 lapo ran	160. 710. 358	12 lapo ran	168. 745. 876	12 lapo ran	177. 183. 170	12 lapo ran	186. 042. 328	12 lapo ran	195. 344. 445	72 lapo ran	1.08 5.59 9.87 6	
				2	Penyedia an jasa pelayana n umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediaka n		12 lapo ran	12 lapo ran	103. 745. 970	12 lapo ran	108. 933. 269	12 lapo ran	114. 379. 932	12 lapo ran	120. 098. 929	12 lapo ran	126. 103. 875	72 lapo ran	623. 356. 074	

				I V	Pemeliharaan an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90%	90%	180. 799. 230	90%	387. 839. 192	90%	87.7 58.1 51	90%	292. 146. 059	90%	306. 753. 362	90%	1.35 7.56 4.15 3	
				1	Penyedia an jasa Pemeliha raan, biaya pemeliha raan, pajak dan perizina n kendara an dinas operasio nal atau lapanga n	Jumlah Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajak dan Perizinann ya	6 unit	6 unit	71.2 49.2 30	6 unit	74.8 11.6 92	6 unit	78.5 52.2 76	6 unit	82.4 79.8 90	6 unit	86.6 03.8 84	36 unit	482. 865. 132	
				2	Pemeliha raan Peralata n dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 unit	24 unit	8.35 0.00 0	24 unit	8.76 7.50 0	24 unit	9.20 5.87 5	24 unit	9.66 6.16 9	24 unit	10.1 49.4 77	144 unit	59.2 39.0 21	
				3	Pemeliha raan/reh abilitasi gedung Kantor dan banguna n	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipellihara /rehab	2 unit	2 unit	101. 200. 000	2 unit	304. 260. 000	2 unit	319. 473. 000	2 unit	335. 446. 650	2 unit	352. 218. 983	12 unit	1.55 6.14 9.63 3	

				lainnya																
				4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara /direhab		0	0	0	0	-	0	0	0	200.000.000	2 unit	210.000.000	4 unit	410.000.000	
				V Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase ketersediaan dokumen pelayanan publik Dinas Perdagangan dan Transmigrasi sesuai standar		80%	80%	-	83%	70.000.000	85%	210.000.000	86%	220.500.000	87%	231.525.000	87%	732.025.000	
				1 Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	3 laporan	-	3 laporan	-	3 laporan	130.000.000	3 laporan	136.500.000	3 dokumen	143.325.000	15 dokumen	409.825.000	

				2 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	4 dokumen	-	4 dokumen	70.000.000	4 dokumen	80.000.000	4 dokumen	84.000.000	4 dokumen	88.200.000	20 dokumen	322.200.000	
				V I Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase TLHP yang diselesaikan	-	100%	31.006.000	100%	32.556.300	100%	34.184.115	100%	35.893.321	100%	37.687.987	100%	171.327.723	
				1 . Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	-	4 unit	31.006.000	6 unit	32.556.300	6 unit	34.184.115	6 unit	35.893.321	6 unit	37.687.987	30 unit	171.327.723	
	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI SEKARA BERTAMBAH	TERWUJUDNYA PERDAGANGAN YANG BERKUALITAS, TERAMBAH DAN BERKUALITAS		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	5,25%	<9%	169.976.895	<9%	218.475.740	<9%	229.399.527	<9%	240.869.503	<9%	252.912.978	<9%	1.258.699.243	

	JUTA N	AN SERT A INDU STRI YANG INOV																		
		ATIF DAN BERD AYA SAIN G		I	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tk Daerah Kabupaten / Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)		16, 00%	16, 2%	36.9 06.4 50	17%	78.7 51.7 73	18%	82.6 89.3 61	19%	86.8 23.8 29	20%	91.1 65.0 21	20%	435. 302. 933
				1	Pemeriks aan Kelengka pan Legalitas Dokume n Perizina n	Jumlah Dokumen Kelengkap an Legalitas Dokumen Perizinan			-	1 dok ume n	40.0 00.0 00	1 dok ume n	42.0 00.0 00	1 dok ume n	44.1 00.0 00	1 dok ume n	46.3 05.0 00	5 dok ume n	201. 371. 500	
				2	Pengawa san Penyalur an dan Penggun aan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasa n Penyalura n dan Penggunaa n Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%			2 lapo ran	36.9 06.4 50	2 lapo ran	38.7 51.7 73	2 lapo ran	40.6 89.3 61	2 lapo ran	42.7 23.8 29	2 lapo ran	44.8 60.0 21	10 lapo ran	233. 931. 433

				I I	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota	Data perkembangan harga bahan pokok dan barang penting lainnya		4 dok ume n	4 dok ume n	92.5 03.0 05	4 dok ume n	97.1 28.1 55	4 dok ume n	101. 984. 563	4 dok ume n	107. 083. 791	4 dok ume n	112. 437. 981	24 dok ume n	599. 235. 595	
				1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		0	12 lapo ran	28.3 50.0 00	12 lapo ran	29.7 67.5 00	12 lapo ran	31.2 55.8 75	12 lapo ran	32.8 18.6 69	12 lapo ran	34.4 59.6 02	60 lapo ran	183. 651. 646	

				2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1(satu) Kabupaten / Kota.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota	0	2 laporan	64.1 53.0 05	2 laporan	67.3 60.6 55	2 laporan	70.7 28.6 88	2 laporan	74.2 65.1 22	2 laporan	77.9 78.3 79	10 laporan	415. 583. 949	
				I I I	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tk Daerah Kabupaten / Kota	Persentase rata rata ketersediaan stock bahan kebutuhan pokok dipasar rakyat dan bahan kebutuhan penting lainnya	90%	90%	40.5 67.4 40	90%	42.5 95.8 12	90%	44.7 25.6 03	90%	46.9 61.8 83	90%	49.3 09.9 77	90%	224. 160. 714	
				1	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	1 laporan	1 laporan	40.5 67.4 40	1 laporan	42.5 95.8 12	1 laporan	44.7 25.6 03	1 laporan	46.9 61.8 83	1 laporan	49.3 09.9 77	5 laporan	224. 160. 714	

				di Tk Agen dan Pasar Rakyat.	Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat															
				PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGA N KONSUMEN	Persentase peningkata n omset perdagang an		5,9 %	6,2 %	214. 998. 840	7,0 0%	700. 000. 000	7,4 %	600. 000. 000	8,3 %	650. 000. 000	9,0 0%	700. 000. 000	44, 00%	3.07 3.29 4.89 0	
				I Pelaksanaa n Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkap an Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku		0,0 9%	0,0 9%	214. 998. 840	0,7 0%	700. 000. 000	1,3 7%	600. 000. 000	1,8 0%	650. 000. 000	2,2 0%	700. 000. 000	0,5 5%	3.07 3.29 4.89 0	
				1 Pelaksan aan Metrolog i Legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkap an Ditera Ulang		80 UTTP	140 UTTP	214. 998. 840	800 UTTP	620. 000. 000	150 0 UTTP	500. 000. 000	200 0 UTTP	530. 000. 000	250 0 UTTP	550. 000. 000	831 UTTP	2.62 3.29 4.89 0	

				2 Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	0	0	-	1000 pelaku usaha	80.000.000	1700 pelaku usaha	100.000.000	2200 pelaku usaha	120.000.000	2700 pelaku usaha	150.000.000	1000 pelaku usaha	450.000.000	
				PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase peningkatan omset perdagangan	5,9%	6,2%	47.128.270	7,00%	710.984.684	7,4%	746.533.918	8,3%	783.860.614	9,00%	823.053.644	44,00%	3.111.561.129	Dinas Koperasi
				I Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase peningkatan volume penjualan komoditi unggulan daerah dalam negeri	2%	2%	47.128.270	2%	710.984.684	2%	746.533.918	2%	783.860.614	2%	823.053.644	12%	3.111.561.129	Dinas Koperasi
				1 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri ditingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10UMKM	10UMKM	-	10UMKM	496.125.000	10UMKM	520.931.250	10UMKM	546.977.813	10UMKM	574.326.703	50UMKM	2.138.360.766	

				2 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi		25 UM KM	25 UM KM	-	25 UM KM	165. 375. 000	25 UM KM	173. 643. 750	25 UM KM	182. 325. 938	25 UM KM	191. 442. 234	125 UM KM	712. 786. 922	
				3 Peningkatan sistem jaringan dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		1 data base	1 data base	47.1 28.2 70	1 data base	49.4 84.6 84	1 data base	51.9 58.9 18	1 data base	54.5 56.8 64	1 data base	57.2 84.7 06,7 4	6 data base	260. 413. 441	
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan omset perdagangan		5,9 %	6,2 %	-	7,0 0%	250. 000. 000	7,4 %	262. 500. 000	8,3 %	275. 625. 000	9,0 0%	289. 406. 250	44, 00%	1.07 7.53 1.25 0	

				I Penyelengga raan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah produk/ komoditi potensial ekspor		0 pro duk	2 pro duk	-	2 pro duk	250. 000. 000	2 pro duk	262. 500. 000	2 pro duk	275. 625. 000	2 pro duk	289. 406. 250	10 pro duk	1.07 7.53 1.25 0	
				1 Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang			0 pela ku usa ha	-	10 pela ku usa ha	150. 000. 000	10 pela ku usa ha	157. 500. 000	10 pela ku usa ha	165. 375. 000	10 pela ku usa ha	173. 643. 750	40 pela ku usa ha	646. 518. 750	
				2 Pembina an Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina			3 pela ku usa ha	-	3 pela ku usa ha	100. 000. 000	4 pela ku usa ha	105. 000. 000	4 pela ku usa ha	110. 250. 000	5 pela ku usa ha	115. 762. 500	19 pela ku usa ha	431. 012. 500	
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGA N	Persentase peningkata n omset perdagang an		5,9 %	6,2 %	889. 820. 620	7,0 0%	2.84 5.56 1.65 1	7,4 %	1.87 7.83 9.73 4	8,3 %	1.97 1.73 1.72 0	9,0 0%	2.07 0.31 8.30 6	44, 00%	10.5 45.0 92.6 51	
				I Pembangun an dan Pengelolaan sarana	Jumlah Pasar Rakyat menuju		1 pas ar	1 pas ar	275. 000. 000	1 pas ar	2.20 0.00 0.00	1 pas ar	1.20 0.00 0.00	1 pas ar	1.26 0.00 0.00	2 pas ar	1.32 3.00 0.00	2 pas ar	6.53 3.00 0.00	

				distribusi perdagangan	kriteria SNI					0		0		0		0		0	
				1 Penyediaan sarana Distribusi perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		50 pas ar	50 pas ar	275.000.000	51 pas ar	2.200.000.000	51 pas ar	1.200.000.000	51 pas ar	1.260.000.000	51 pas ar	1.320.000.000	51 pas ar	6.530.000.000
				I Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI		1 pas ar	1 pas ar	614.820.620	1 pas ar	645.561.651	1 pas ar	677.839.734	1 pas ar	711.731.720	2 pas ar	747.318.306	2 pas ar	4.012.092.651
				1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		11 dokumen	11 dokumen	614.820.620	11 dokumen	645.561.651	11 dokumen	677.839.734	12 dokumen	711.731.720	12 dokumen	747.318.306	68 dokumen	4.012.092.651
				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan omset perdagangan		5,9 %	6,2 %	-	7,0 0%	71.000.000	7,4 %	74.550.000	8,3 %	78.277.500	9,0 0%	82.191.375	44,00%	306.018.875

			I	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)		52%	55%	-	57%	46.000.000	60%	48.300.000	62%	50.715.000	65%	53.250.750	65%	198.265.750	
			1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Berintegrasi Secara	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Berintegrasi Secara		1 reko mendasi	1 reko mendasi	-	1 reko mendasi	46.000.000	1 reko mendasi	48.300.000	1 reko mendasi	50.715.000	1 reko mendasi	53.250.750	6 reko mendasi	198.265.750	

				n Berusah a Terintegr asi Secara Elektroni	Elektronik																
				I I	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Persentase Pelaku Usaha yang Memperole h Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanja an dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)		52%	55%	-	57%	25.0 00.0 00	60%	26.2 50.0 00	62%	27.5 62.5 00	65%	28.9 40.6 25	65%	107. 753. 125	

				1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri		1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	25.000.000	1 dokumen	26.250.000	1 dokumen	27.562.500	1 dokumen	28.940.625	6 dokumen	107.753.125	
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Peningkatan omset IKM (%)	1,29 %	1,8 %	2,00 %	16.901.932.090	2,2 %	17.916.180.967	2,5 %	2.800.000.000	2,7 %	857.330.000	3,5 %	1.120.000.000	15,00 %	55.157.267.057	
				I Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangu		0,00 %	14,20 %	16.901.932.090	18,50 %	17.916.180.967	22,00 %	2.800.000.000	25,20 %	857.330.000	30,00 %	1.120.000.000	30,00 %	55.157.267.057	

					nan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK														
					Pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah	1,20 %	2,00 %	2,30 %		2,61 %		4,62 %		5,70 %		6,28 %		23,47 %	-
				1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		0 dokumen	5 dokumen	172.235.931	5 dokumen	350.000.000	5 dokumen	300.000.000	5 dokumen	300.000.000	5 dokumen	300.000.000	25 dokumen	1.422.235.931

				2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		0 dokumen	2 dokumen	52.000.000	2 dokumen	54.600.000	4 dokumen	2.000.000.000	2 dokumen	57.300.000	2 dokumen	320.000.000	12 dokumen	2.483.930.000	
				3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		4 dokumen	4 dokumen	16.677.696.159	4 dokumen	17.511.580.967	4 dokumen	500.000.000	4 dokumen	500.000.000	4 dokumen	500.000.000	24 dokumen	51.251.101.126	
					PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Peningkatan omset IKM (%)	1,29 %	1,8 %	2,00 %	25.000.000	2,2 %	51.250.000	2,5 %	53.812.500	2,7 %	56.503.125	3,5 %	59.328.281	15,00 %	291.359.906	

				I	Penerbitan Izin Usaha Industri (UI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (UKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan	Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (UI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 %	100 %	100 %	25.000.000	100 %	51.250.000	100 %	53.812.500	100 %	56.503.125	100 %	59.328.281	100 %	291.359.906	
					n Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		-	0%		0%		0%		0%		90%		90%	-	

					Persentase hasil pemantau an dan pengawasa n dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang dikeluarka n oleh instansi terkait		-	0%		0%		0%		0%		0%		0%	-	
--	--	--	--	--	---	--	---	----	--	----	--	----	--	----	--	----	--	----	---	--

				1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan (IUI) Kewenangan Kabupaten/Kota, Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS		5 dok ume n	12 dok ume n	25.0 00.0 00	12 dok ume n	26.2 50.0 00	12 dok ume n	27.5 62.5 00	12 dok ume n	28.9 40.6 25	12 dok ume n	30.3 87.6 56	65 dok ume n	179. 606. 781	
--	--	--	--	---	---	---	--	----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	---------------------	--

				2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota		1 dokumen	0 dokumen	-	4 dokumen	25.000.000	4 dokumen	26.250.000	4 dokumen	27.562.500	4 dokumen	28.940.625	17 dokumen	111.753.125	
						Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan															

					n Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegra si dengan Sistem OSS															
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Peningkata n omset IKM (%)	1,29 %	1,8 %	2,0 0%	64.7 99.8 80	2,2 %	218. 039. 874	2,5 %	228. 941. 868	2,7 %	240. 388. 961	3,5 %	252. 408. 409	15%	1.05 2.67 8.99 2	

			I	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini		100 %	100 %	64.7 99.8 80	100 %	218. 039. 874	100 %	228. 941. 868	100 %	240. 388. 961	100 %	252. 408. 409	100 %	1.05 2.67 8.99 2	
			1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Kawasan Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		15 dok ume n	15 dok ume n	64.7 99.8 80	15 dok ume n	68.0 39.8 74	15 dok ume n	71.4 41.8 68	15 dok ume n	75.0 13.9 61	15 dok ume n	78.7 64.6 59	90 dok ume n	406. 160. 242	

				2 Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten /Kota Melalui SIINas		0 dokumen	2 dokumen		2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	157.500.000	2 dokumen	165.375.000	2 dokumen	173.643.750	10 dokumen	646.518.750	
	MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TRANSMIGRASI	MENINGKATKAN KEMANDIRIAN LEMBAGA DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KAWASAN TRANSMIGRASI		PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	NA	0 kawasan	0 kawasan	0	0 kawasan	0	0 kawasan	0	1 kawasan	10.250.000.000	0 kawasan	-	1 kawasan	10.250.000.000	
	ERAA N MASYARAKAT TRANSMIGRASI	AGADAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KAWASAN TRANSMIGRASI		I Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Luas tanah yang dicadangkan untuk pembangunan kawasan transmigrasi		0 hektar	0 hektar	0	0 hektar	0	0 hektar	0	30 hektar	10.250.000.000	0		30 hektar	10.250.000.000	

					Fasilitasi HPK menjadi APL untuk Transmigrasi lokal (Hektar)		0 HPK	0 HPK		1 HPK		1 HPK		0 HPK		0 HPK		2 HPK	-			
				1	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain		0 dokumen	0 dokumen		0 dokumen		0 dokumen		1 dokumen	100.000.000		0 dokumen		1 dokumen	100.000.000	
				2	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi		0 kasus	0 kasus		0 kasus		0 kasus		2 kasus	150.000.000		0 kasus		2 kasus	150.000.000	

				3 Penyedia an Tanah untuk Pembang unan Kawasan Transmi grasi	Luas Tanah untuk Pembangu nan Kawasan Transmigr asi	0 hek tar	0 hek tar		0 hek tar		0 hek tar		30 hek tar	10.0 00.0 00.0 00	0 hek tar		30 hek tar	10.0 00.0 00.0 00	
				PROGRAM PEMBANGUNA N KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah pemukima n transmigra si yang difasilitasi pembangu nannya	0 pem uki ma n	0 pem uki ma n	0	0 pem uki ma n	0	0 pem uki ma n	0	0 pem uki ma n	0	1 pem uki ma n	15.0 00.0 00.0 00	1 pem uki ma n	15.0 00.0 00.0 00	
				I Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah permukim an yang ditata	0 pem uki ma n	0 pem uki ma n		0 pem uki ma n		0 pem uki ma n		0 pem uki ma n		1 pem uki ma n	15.0 00.0 00.0 00	1 pem uki ma n	15.0 00.0 00.0 00	
					Jumlah KK di pemukima n baru	0 KK	0 KK		0 KK		0 KK		0 KK		90 KK		90 KK	-	

				1	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)		0 laporan	0 laporan		0 laporan		0 laporan		0 laporan		3 laporan	10.000.000.000	3 laporan	10.000.000.000	
				2	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan		0 transmigran	0 transmigran		0 transmigran		0 transmigran		50 transmigran	5.000.000.000	50 transmigran	5.000.000.000			
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah lembaga ekonomi dan sosial di kawasan transmigrasi		10 lembaga	15 lembaga	584.999.720	20 lembaga	1.715.499.819	25 lembaga	2.600.000.000	30 lembaga	2.900.000.000	35 lembaga	5.600.000.000	35 lembaga	13.400.499.539		

					Jumlah sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di kawasan transmigrasi		17 unit	18 unit		19 unit		20 unit		21 unit		22 unit		22 unit	-	
				I	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang dibangun	1 unit	1 unit	584.999.720	1 unit	1.715.499.819	1 unit	2.600.000.000	1 unit	2.900.000.000	1 unit	5.600.000.000	6 unit	13.400.499.539	
						Jumlah satuan permukiman yang dibangun	0 pemukiman	1 pemukiman		1 pemukiman		1 pemukiman		1 pemukiman		1 pemukiman		5 pemukiman	-	
				1	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	0	40 KK	109.999.828	50 KK	115.499.819	70 KK	500.000.000	80 KK	500.000.000	90 KK	600.000.000	330 KK	1.825.499.647	

				2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantauan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan		1 satu an pem uki ma n	1 satu an pem uki ma n	474. 999. 892	1 satu an pem uki ma n	1.60 0.00 0.00 0	1 satu an pem uki ma n	2.10 0.00 0.00 0	1 satu an pem uki ma n	2.40 0.00 0.00 0	2 satu an pem uki ma n	5.00 0.00 0.00 0	6 satu an pem uki ma n	11.5 74.9 99.8 92	
--	--	--	--	---	--	---	--	--	--	---------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	---------------------------	--	----------------------------	--

Painan, Desember 2021
BUPATI PESISIR SELATAN

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd